

IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BARITO TIMUR PELUNCURAN APLIKASI SIMANTRA GUNA PENCEGAHAN KORUPSI

**Jarau Matodi
Veri**

Abstrak

Perkembangan zaman yang pesat mendorong kemajuan dalam ilmu dan teknologi, khususnya dalam pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan. Dalam banyak hal yang terjadi didalam pemerintahan ataupun hal yang berkaitan dengan dana pemerintah banyak terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan dana yang dilakukan oleh oknum pemerintahan maupun pegawai untuk menghindari hal tersebut maka pemerintah Kabupaten Barito Timur Tamiang Layang melakukan penerapan sebuah Aplikasi guna menghindari korupsi penyalahgunaan dana anggaran "**Penerapan E-government Dalam Peluncuran Aplikasi Simantra Guna Pencegahan Korupsi**" Dengan adanya info ini dapat dipastikan bahwa Kabupaten Barito Timur Tamiang Layang telah melakukan penerapan E-government pada wilayahnya dengan tujuan menghindari segala macam bentuk penyalahgunaan dana anggaran pemerintah sehingga dana tersebut dapat digunakan semaksimal mungkin oleh daerahnya masing-masing.

Walaupun masih dengan keadaan teknologi dan koneksi yang belum maksimal pemerintah Kabupaten Barito Timur terus berusaha agar Aplikasi Simantra dapat berjalan dengan baik mengingat keuntungan yang sangat besar dari adanya aplikasi ini dapat mengontrol berbagai aplikasi yang digunakan oleh setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Transparansi yang dilakukan oleh aplikasi dalam pengelolaan data dari setiap SOPD kabupaten BARTIM akan lebih mudah terkoneksi oleh aplikasi yang terpusat dengan Diskominfo.

Kata Kunci : E-government, Indonesia, Pelayanan Publik, Simantra

PENDAHULUAN

Salah satu wujud pertumbuhan era yang berjalan sangat pesat merupakan teknologi. Terus menjadi berkembangnya teknologi membuat hal-hal yang dulu dikerjakan secara manual serta memerlukan waktu yang lama dikala ini jadi gampang serta cecepat. Internet adalah salah satu teknologi sebagaimana yang sangat tumbuh. Dengan terdapatnya internet bisa menolong penunah kebutuhan data pada warga. Sehingga kemudahan memperoleh data yang kilat, pas serta akurat jadi perihal yang gampang dikala ini. Pemakaian teknologi data dikala ini telah diterapkan diberbagai bidang, salah satunya di bidang Pemerintahan. Dalam penyelenggaraan

pemerintahan pemakaian teknologi informasi disebut dengan istilah E-government (Fadillah, 2017). Lewat E-government segala lembaga-lembaga negeri, dunia usaha, warga serta pihak-pihak yang berkepentingan yang lain bisa tiap waktu menggunakan data serta layanan pemerintah secara maksimal. Pemakaian teknologi dalam pelaksanaan E-gov ialah suatu upaya yang dilaksanakan pada lembaga pemerintahan dalam memaksimalkan penyediaan jasa layanan untuk warga. Tidak hanya itu pemakaian E-gov pula berupaya membuat penyelenggaraan pelayanan publik lebih efisien serta efektif dari segi pemakaian waktu, anggaran, serta pelaksanaan ikatan ataupun kedekatan yang gampang. Pelaksanaan inovasi E-government sendiri telah sudah banyak dicoba di segala Indonesia tetapi dengan tingkatan keberhasilan yang bermacam-macam. E-Government dalam pelaksanaannya tidak cuma hanya memakai teknologi semata namun wajib didukung dengan regulasi serta kebijakan yang baik pula. Sebagian kasus yang jadi pemicu gagalnya pengembangan serta pelaksanaan E-government merupakan ketidaksiapan sumberdaya manusia, teknologi data yang ada, budaya organisasi pemerintah, dan minimnya atensi dari pihak-pihak yang ikut serta secara langsung. Korea Selatan ialah salah satu negeri terbaik dalam mempraktikkan e-government bersumber pada evaluasi dari PBB. Sebagian E-government di Korea Selatan jadi best practice E-government yang dijadikan selaku percontohan pelaksanaan e-government di dunia. Negeri ini senantiasa masuk dalam 10 terbaik pelaksanaan E-government di dunia. Pelaksanaan E-government di Korea pula berakibat pada pemberantasan korupsinya. Di Indonesia sebagian wilayah pelaksanaannya semacam Kabupaten Barito Timur. Tidak cuma di Korea Selatan saja yang pelaksanaan E-government nya berakibat baik terhadap pemberantasan korupsi, Indonesia juga demikian sebab e-government bisa meningkatkan transparansi publik.

Electronic Government ataupun sebutan dari E-government, dengan artian sesuatu sistem pemerintahan dengan memakai jaringan ataupun online ataupun digital selaku transformasi penyelenggaraan pemerintahannya. Dengan terdapatnya E-government ini dimana upaya daripada salah satu kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyalahgunaan dana anggaran yang dicoba oleh SOPD sehingga

bisa membagikan rasa nyaman terhadap warga karna Transparansi yang dilakuka memakai pelaksanaan E- government berbasis Aplikasi Simantra yang bisa menghindari terdapatnya korupsi dari SOPD tersebut, teknologi ini sangat menolong pemerintah dalam mengendalikan serta mengawasi pemerintahannya supaya bisa berjalan dengan baik E- government sangat lah menolong pemerintahan serta pula sangat menolong masyarakat dalam menempuh urusannya tiap hari karna kemudahan yang didapat dari kepraktisan dalam berurusan seperti itu kenapa E- government sangat membantu serta wajib sanggup diterapkan karna akibat yang begitu baik dari electronic pemerintahan tersebut yang dimana warga idak lagi wajib bersusah payah dalam melaksanakan urusannya serta dengan terdapatnya pelaksanaan E- government warga cuma duduk manis dirumah hingga urusannya berakhir tanpa butuh menghasilkan bayaran ataupun tenaga.

E- government ataupun electronic government ialah salah satu terobosan yang dicoba oleh umat manusia dalam menggunakan teknologi internet yang dini mulanya digunakan buat militer sehabis masa perang berakhir mulailah Internet di kenalkan kepada masyarakat global serta bersamaan pertumbuhan serta investasi dalam bidang TIK sehingga bertansformasi serta banyak digunakan dalam zona bisnis dimana memakai TIK dalam sistem buat mempermudah seluruh urusan yang berkaitan dengan bisnisnya misalkan pesan elektronik serta lain- lain. E- government tercetus dini mulanya terjalin di Britania Raya, yang jadi pusat pemerintahannya terdapat London dengan melakukan sesuatu pemilihan E- voting pada tahun 1980. Pelaksanaan E- government sendiri dilandaskan buat menyemaksimalan atas kemudahan warga dalam halnya efisiensi, kenyamanan, serta transparansinya sistem pemerintahan. Kebijakan pemerintah terkait pemanfaatan teknologi informasi antara lain dituangkan dalam bentuk Inpres No.3 tahun 2003 dan keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi tentang perkembangan e-Gov yang merupakan perencanaan pemerintah dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. E- government di Indonesia sendiri diawali pada tahun 2003 semenjak ditetapkannya Inpres Nomor. 3 tahun 2003 tentang kebijakan serta strategi nasional pengembangan E- government, dimana Inpres ini jadi landasan pelaksanaan e- government di Indonesia. Pemerintah Wilayah

ditunjukkan dalam halnya mewujudkan kesejahteraan warga lewat sumber energi yang terdapat atas wilayah bersangkutan guna tingkatkan pembangunan dari wilayah itu sendiri, tidak hanya itu Pemerintah Wilayah pula melakukan urusan Pemerintahan Pusat yang telah diserahkan urusannya kepada wilayah otonom buat dikelola bersama. Dengan ini Gubernur, Walikota serta bupati lewat asas otonomi wilayah bisa mempraktikkan serta meningkatkan sebaik- baiknya dari gimana pelaksanaan E- government supaya terlaksana serta menggapai nawacita bangsa Indonesia. Lewat otonomi wilayah E- government mempunyai perbandingan serta karakteristik khas ataupun sasaran tiap- tiap perihal ini didasarkan pada letak geografis serta SDM yang terdapat di wilayah tersebut. Pemanfaatan dan pengembangan dari E- government ini merupakan salah satu kemajuan dalam mutu sesuatu kinerja sampai persembahkan pelayanan publik kepada warga dengan berbasis teknologi. Dengan ini seluruh supaya pelaksanaan E- government bisa terlaksana diperlukan etos kerja dan proses kerja yang dicoba oleh aparaturn pemerintahan selaku lembaga yang melayani warga yang berkompeten pula atas Teknologi Data Pemerintahan ini. Pada intinya aspek menimpa kemanfaatan dan penyelenggaraan e- government merujuk pada perbaikan- perbaikan dalam penyelenggaraan, terkhususnya di wilayah dalam sebagian perihal semacam daya guna/ efisiensi, dan mutu dari pelayanan itu sendiri. Era yang senantiasa tumbuh membuat pemanfaatan TIK dituntun supaya pemerintahan wilayah dapat sejalan beriringan. Mengingat sekarang telah merambah pemerintahan.

TUJUAN

E-government yang berbasis Aplikasi Simantra ini hadir sebagai tujuan untuk meningkatkan efektivitas/efisiensi agar terciptanya lingkungan pemerintahan yang bebas dari penyalahgunaan dana anggaran pemerintah. Sistem ini dibuat untuk dapat tercapainya keamnan dalam pemerintahan dan terciptanya transparansi pemerintah dengan masyarakat agar dapat timbulnya rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah bahwa dana tersebut digunakan dengan semestinya oleh pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur dan agar pemerintah dapat menindak dengan tegas oknum-oknum yang melakukan korupsi didalam pemerintahannya dan juga dengan

adanya aplikasi tersebut pemerintah Kabupaten Barito Timur dapat melakukan pengawasan yang lebih baik dan menyeluruh dengan adanya aplikasi tersebut pastinya akan sangat membantu pemerintahan dalam mengatur urusan dana anggaran tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian studi literatur, riset dengan riset literatur tidak wajib turun ke lapangan. Penelitian ini persiapannya sama dengan riset yang lain hendak namun sumber serta tata cara pengumpulan informasi dengan mengambil informasi di pustaka, membaca, mencatat, serta mencerna bahan riset. Data- data yang diperlukan dalam riset diperoleh dari sumber pustaka riset terdahulu yang mangulas terpaut dengan e-government dan informasi yang valid dari web e-government pemerintah Kabupaten Barito Timur dan beberapa website e-government pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Hal ini dilakukan karena masih terjadinya pandemi covid-19 yang masih terjadi saat ini sehingga penulisan artikel hanya mengandalkan referensi dari literature baik dari buku-buku, jurnal, artikel, internet dalam pengumpulan data untuk menjadi bahan artikel. Subjek dari penelitian ini diambil dari sumber tersebut.

<https://www.baritorayapost.com/2019/01/pemkab-bartim-melalui-diskominfo.html?m=1>

PEMBAHASAN

Dalam menghadapi tantangan masa globalisasi, pemerintah Republik Indonesia berinovasi membuat kebijakan menggunakan teknologi data serta komunikasi yang terintegrasi mulai dari tingkatan pemerintahan wilayah sampai ke pusat. Kebijakan pemerintah terpaut pemanfaatan teknologi data antara lain dituangkan dalam wujud Inpres Nomor. 3 tahun 2003 serta keputusan Menteri Komunikasi serta Data tentang pertumbuhan e- Gov yang ialah perencanaan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan- kebijakannya demi tingkatkan kesejahteraan rakyat. Walaupun pelaksanaan E-Government di Indonesia tidak sebaik serta secanggih e-government di Korea Selatan, tetapi e-government di Indonesia berupaya di perbaiki tiap dikala cocok dengan pertumbuhan era. Pemerintah Indonesia sudah

mengembangkan Government Service Bis(GSB), yang bertujuan buat menghubungkan server- server yang terdapat diKementrian/ Lembaga/ Satuan Kerja Fitur Wilayah([www. kominfo. go. id](http://www.kominfo.go.id)).

Pada bulan Juli 2018 Pemerintah Barito Timur dimana Kepala Dinas Kominfo dr.Husni Anwar menjelaskan, Untuk mengintegrasikan Sistem Aplikasi, apa bila Aplikasi tersebut berada pada Server masing-masing OPD maka di perlukan Aplikasi SIMANTRA sebagai penghubung jembatan bagi Aplikasi tersebut, sebelumnya Pemkab Bartim melalui Diskominfo telah di lakukan koordinasi atau konsultasi ke Kementrian Kominfo. Kabupaten Barito Timur meningkatkan aplikasi SIMANTRA lewat Tubuh Layanan Terpadu. Sistem Elektronik dan pemahaman tentang UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdapat pula halnya pada One Stop Service Centre merupakan suatu institusi yang membagikan sokongan pengembangan satuan kerja layanan perijinan terpadu. Dalam rangka menyelenggarakan perihal tersebut pemerintah wilayah sudah menghasilkan kebijakan yang bertujuan buat mengefektifkan, mengefisiensikan serta mendekatkan pelayanan kepada warga. Salah satu kebijakannya ialah kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia no 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berupaya Terintegrasi Secara Elektronik. Kebijakan Sistem Online Single Submission(OSS) dilaksanakan dengan tujuan buat menolong para pelakon usaha yang mau membuat izin usahanya supaya lebih gampang. Diharapkan dengan di terapkannya perizinan lewat Online Single Submission(OSS) hendak membagikan akibat yang lebih baik lagi serta membagikan kepuasan untuk warga. Riset ini memakai tata cara pendekatan kualitatif. Ruang lingkup riset ini ialah dinas penanaman modal serta pelayanan terpadu satu pintu kabupaten suban. Yang jadi sumber data(informan) ialah penanggung jawab dari pemerintah wilayah, dalam perihal ini pihak yang terpaut merupakan pegawai pemerintah wilayah(PEMDA) di bagian pemerintahan serta bidang pengembangan sistem data Online Single Submission di Dinas Penanaman Modal Serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang. Pengumpulan informasi dicoba dengan metode observasi, wawancara serta dokumentasi. Informasi yang diperoleh setelah itu di analisa memakai metode triangulasi, setelah itu di susun secara sistematis sehingga pada sesi

penarikan kesimpulan bertabiat interpretatif. Hasil riset membuktikan implementasi sistem online single submission belum berjalan efisien sehingga tujuan dari OSS buat tingkatkan mutu serta mendekatkan pelayanan kepada warga belum efisien serta efektif. Pemerintah Indonesia sudah meningkatkan Government Service Bis(GSB), yang bertujuan buat menghubungkan server- server yang terdapat diKementrian/ Lembaga/ Satuan Kerja Fitur Wilayah(www.kominfo.go.id). Dalam mengintegrasikan informasi tersebut memakai aplikasi SIMANTRA(Indrayani, 2016). SIMANTRA merupakan aplikasi manajemen pertukaran informasi pemerintah. Tidak hanya itu digunakan pula SIMDA(Sistem Data Manajemen Wilayah) yang diinstal terlebih dulu perencanaan 5 tahunan, SIMDA Perencanaan satu tahunan serta SIMDA Keuangan pada fitur server Diskominfo, serta kedepannya di rencanakan hendak di integrasikan aplikasi pada tiap- tiap Organisasi Pemerintah Wilayah(OPD) pada informasi center yang terdapat di Kementrian/ Lembaga/ Satuan Kerja Fitur Wilayah. Tidak hanya itu, proses pelayanan yang simpel membagikan kesan transparan yang berikan konsumen keyakinan terhadap para karyawan serta institusi tersebut.

Masa 4. 0 mendesak segala warga buat bergerak selaras atas era yang berevolusi ataupun berinovasi tiap waktunya, terkhusus dalam perihal kebutuhan warga paling utama dalam halnya penunji pelayanan data yang baik. Hendak perihal ini era membagikan siklus dalam gimana pekermbangan pemenuhan pelayanan data tersebut. Dalam akses globaisasi hingga muncullah teknologi- teknologi baru buat sesuatu efektifitas dan efisiensi kinerja serta perolehan pelayanan infomasi. Dengan ini implemantasi E- government menitikberatkan pada prinsip pemerintahan efisien serta efektif dalam pelaksanaan membuat Kabupaten Barito Timur memakai suatu aplikasi SIMANTRA selaku implementasi dari konsep E- government tersebut. Aplikasi digunakan selaku strategi pemenuhan jangka panjang dalam keberlangsungan organisasi supaya tujuan atas pelayanan data yang berimpletasi terhadap E- government bisa berjalan efisien serta efektif, yang mana didalamnya ada bermacam rangkaian penerapan atas apa yang diperlukan dari penerima pelayanan tersebut.

2.1. Efektivitas Dan Efisiensinya

Dalam konteks good government, daya guna serta efisiensi pula selaku tolak ukur didalamnya karna menyangkut dari mutu dari penyelenggarannya. Serta dengan terdapatnya ikatan dengan gimana keterbukaan ataupun transparansi yang diberikan dari pemerintahan guna memunculkan rasa yakin warga hendak perihal tersebut. Dengan demikian terdapatnya sistem elektronik bertujuan buat mendesak serta tingkatkan mutu penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Didalam transparansi ini dapat diperuntukan hendak isu berarti didalam berdemokrasi, paling utama halnya dalam kebijakan ataupun gagasan pemerintah yang diberikan buat warga. dengan demikian warga bisa mengendalikan dan mengawasi apa aja yang dicoba pemerintah dalam pengembangan kemajuan tersebut, serta ini merujuk pada akuntabilitas dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan terkhususnya dalam pelayanan publik. Oleh karena itu good government menunjang atas menggunakan teknologi ataupun e- government didalam penyelenggaraan pemerintahan, sebab perihal ini mendesak hendak transparansi/ keterbukaan serta daya guna dan efisiensi yang diberikan oleh pemerintah itu sendiri.

Selaku pusat data aplikasi digunakan selaku tolak ukur dalam halnya efektifitas dan efisiensinya dalam penggalian informasi ataupun data yang terdapat di sistem web paling utama di Kabupaten Barito Timur. Seluruh ini bisa nampak dari gimana interaksi yang mana saja yang bisa diakses dari web tersebut ataupun simplenya jangkauan dalam data yang terdapat didalam aplikasi ini tanpa wajib berjumpa buat wawancara ataupun dalam mengakses bermacam data yang terdapat, lumayan mengklik" link" hingga bisa mengenali bermacam data terpaut. Disini nampak efisiensinya dari web ini mempermudah serta membagikan jangkauan yang seluas- luasnya terhadap warga dalam menggali data sampai kabar dan melakukan urusan semacam membayar PBB (pajak bumi serta bangunan) yang dahulu wajib ke dinas terpaut buat membayar pajak tersebut serta saat ini cuma butuh mengklik e- PBB hingga hendak bisa mengurus pajak PBB yang terdapat di Kabupaten Barito Timur. Kemunculan web yang jadi acuan baru dalam kenaikan e- government yang terdapat didaerah dengan membuat interaksi data secara universal dengan fitur didalamnya. Kedudukan web yang

terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat membuat sesuatu konsep dari e-government terkhususnya dalam penyampaian data dari wilayah setempat telah berjalan dengan semestinya. Dengan pengeloan web yang didalamnya ada biodata sampai kabar dan isi apa saja tentang data yang muat kondisi Kabupaten Barito Timur bisa diimplementasikan selaku pengelolaan, pengawasan serta kontrol dan khasiat web itu sendiri selaku pusat informasi yang butuh warga tahu terhadap pemerintahan dan daerahnya tersebut. Partisipasi dalam aspirasi masyarakat dalam pembangunan wilayah bisa diinformasikan lewat “Layanan Data Publik” yang terdapat di aplikasi tersebut. Aplikasi bisa dijadikan media jembatan penghubung antara pemerintah wilayah kepada warga ataupun sebaliknya, warga kepada pemerintah. Sebab tujuan dari e-government ini mengacu pada gimana pemakaian teknologi data, semacam halnya dalam pemakaian internet selaku penggalian data yang bisa menghubungkan langsung apa kepada penduduk dari aspirasi yang tersampaikan lewat “Layanan Data Publik”. Sehingga dengan ini kedudukan pemerintah terhadap warga lewat pertumbuhan aplikasi ini jadi perlengkapan dalam mengelola, mengatur dan mengawas dalam halnya membagikan kabar maupun data apa saja yang terpaut dengan wilayah setempat atas apasaja yang butuh diketahuai oleh warga. Dalam web Kabupaten Barito Timur telah tertera bermacam kabar sampai transparansi yang butuh dikenal oleh warga.

Pemberlakuan pelayanan publik lewat web ini merupakan tujuan dari kemudahan warga dalam menggali data menimpa transparannya pemerintah dalam halnya mengakses data kabar menimpa urusan pemerintahan sampai tentang apa saja ke pemerintahan wilayah yang terdapat di Kabupaten Barito Timur. Lewat bermacam fitur yang terdapat di aplikasi ini membuat bermacam data bisa diakses dalam satu forum dengan memencet “link” yang hendak dicari datanya. Seluruh ini bisa nampak dari “Publikasi” yang didalamnya terdapat “Jadwal Aktivitas” sampai “Pengumuman”, dengan ini segala aktivitas yang dicoba oleh Kabupaten Barito Timur selaku kabar untuk warga selaku dikenal. Berikutnya dalam bermacam urusan pemerontahannya, didalam web ini ada akses dalam visi dan misi serta bermacam urusan pemerintahan setempat dalam pelansanaannya. Didalam “Transparansi” web ini mengemukakan gimana “Perencanaan Wilayah”

serta“ Pengelolaan Keuangan Wilayah” dalam wujud file format PDF yang bisa diunduh selaku data yang bisa dikenal secara universal.

Bersumber pada ini seluruh hingga bisa dilihat sesuatu daya guna serta efisiensinya dari aplikasi yang dibesarkan oleh Kabupaten Barito Timur, sehingga kemudahan dalam mengakses data dapat dicoba dimana saja secara seluas- luasnya. Tidak hanya itu pula keyakinan warga atas pemerintah bisa terbangun dengan terdapatnya transparansi data yang terdapat didalam web tersebut, dengan ini membuat warga bisa berpartisipasi hendak daerahnya. Dengan partisipasi warga ini membuat pemerintah tau apa saja aspirasi maupun keluh kesah yang di informasikan lewat“ Layanan Data Publik”, yang ada diwebsite Kabupaten Barito Timur. Aplikasi ini berperan kala warga ambil kedudukan dalam pembangunan daerahnya, sebab yang lebih tau merupakan warga selaku narasumber utama dalam pembangunan serta pertumbuhan yang terdapat di wilayah. Pada intinya web ini bermuara kepada keyakinan serta kemudahan warga dalam halnya berhubungan kepada pemerintah, dengan kontribuksinya atas tujuan kebijakan yang ada.

2.2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Penggunaan Aplikasi

Penggunaan Aplikasi Simantra merupakan aplikasi yang sangat membantu pemerintahan dan juga masyarakat,karna adanya aplikasi tersebut dapat mendukung berjalannya rencana pemerintah dengan baik karna dana yang dianggarkan oleh pemerintah dapat dipakai dengan semestinya sehingga meniptakan kesan yang aman dan juga masyarakat nya juga dapat melihat dengan sendiri dana tersebut dipakai untuk keperluan apa saja karna aplikasi tersebut membuat transparansi antara pemerintah dengan masyarakatnya,baik pemerintah maupun masyarakat akan sangat terbantu dengan adanya aplikasi simantra ini.

Dengan kemajuan teknologi yang semakin maju saat ini manusia dipacu agar dapat berkembang menyesuaikan zaman saat ini yang dimana segala sesuatu dilakukan secara online dan menggunakan teknologi itulah mengapa pemerintahan diindonesia harus mampu beradaptasi dengan hal tersebut agar mampu berkembang dan bertahan dari kemajuan teknologi dengan pemberdayaan SDM di indonesia pastinya akan sangat membantu pemerintahan maupun bidang lainnya karna setiap orang mampu berkerja

tanpa terhambat dengan adanya kemajuan teknologi saat ini itulah mengapa Pendidikan menjadi hal yang sangat penting agar dapat menunjang sumber SDM di Indonesia yang sangat berlimpah, Selanjutnya pandangan dari faktor penghambat dalam penggunaan Aplikasi tersebut adalah pemenuhan fasilitas teknologi yang kurang maksimal, masih terbatasnya koneksi internet yang belum begitu baik di daerah sehingga menghambat berjalannya sebuah aplikasi yang memerlukan koneksi internet seperti Aplikasi Simantra ini serta SDM yang masih minim pengetahuan juga merupakan factor penghambat mengapa Aplikasi ini sangat sulit untuk berjalan maksimal dan terlaksana dengan semestinya. SDM sangat berpengaruh karena jika aparatur pemerintahan itu sendiri tidak lancar dalam menggunakan teknologi maka akan menjadi penghambat kelancaran dan pengembangan dari E-governemnt itu sendiri. SDM seharusnya diberikan pemahaman atau sosialisasi tentang penggunaab teknologi dan internet agar mampu mempergunakan E-government dengan baik sehingga mendapatkan keuntungan dari hal tersebut akan sia-sia kecanggihan teknologi jika manusianya tidak dapat memamfaatkannya dengan bijak dan benar.

KESIMPULAN DAN SARAN

E- government merupakan salah satu inovasi di dalam sistem pemerintahan yang dimana pada awalmulanya sistem pemerintahan mempunyai birokrasi yang berbelit serta memakan waktu yang lama serta warga wajib menghasilkan duit ekstra buat mengurus- urusannya di dinas terpaut buat memperoleh ttd, pesan saran, membayar pajak, dll. Dengan terdapatnya e- government sendiri pemerintah berupaya supaya pemerintahannya terlaksana dengan efisien serta efektif sehingga warga tidak butuh menghasilkan ongkos buat mengurus- urusannya di dinas terpaut lumayan dirumah saja dengan membuka web pemerintahan daerahnya tiap- tiap warga bisa mengakses pelayanan tanpa wajib menunggu serta dengan waktu yang tidak lama hingga urusannya hendak di urus oleh dinas terpaut lewat web tersebut, Pemerintah kabupaten kotawaringin barat mempunyai web yang terbilang lengkap dimana ada sebagian fitur sistem layanan. Pemakaian teknologi dengan pelaksanaan e- gov ialah suatu upaya yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan dalam

memaksimalkan penyediaan jasa layanan untuk warga. Korea Selatan ialah negeri yang senantiasa masuk dalam 10 terbaik pelaksanaan eGovernment di dunia. Terdapat sebagian best practice pelaksanaan e- gov di Korea Selatan yang bisa dijadikan contoh buat negeri Indonesia. E-Participation merupakan salah satu wujud e- gov yang bisa digunakan warga Korea Selatan buat bisa menyampaikan kritik, anjuran serta keluhannya serta aspirasi yang mereka sampaikan bisa pengaruhi pengambilan keputusan Pemerintah. E- post web ini menawarkan layanan pos dengan keyakinan warga terhadap kinerja pemerintah terus menjadi bertambah. Tidak hanya itu dalam tingkatkan indeks anggapan korupsi memerlukan donasi dari bermacam pihak tidak cuma pemerintah saja tetapi pula warga serta dunia usaha. Sedangkan di Indonesia sendiri sebagian wilayah lumayan kreatif serta inovatif dalam mempraktikkan e- government. Terdapat sebagian wilayah yang telah mempraktikkan e- government yaitu penggunaan aplikasi SIMANTRA yang dilakukan di daerah Barito Timur. Memandang keadaan tersebut pemerintah berupaya membetulkan tata kelola pemerintahan demi tingkatkan pelayanan publik serta pemertaan pembangunan, sehingga kurangi ataupun apalagi memberantas praktik- praktik korupsi.

Daftar Pustaka

- Baritorayapost.com*. (2019, Januari 1). Retrieved from Diskominfo Bartim Lakukan Bimtek Sekaligus Penginstalan SIMANTRA di Kemenfo Pusat: <https://www.baritorayapost.com/2019/01/diskominfo-bartim-lakukan-bimtek.html>
- Diah Wahyuningsih, Eko Priyo Purnomo. (2020, Juni). *Jurnal noken ilmu-ilmu sosial*. Retrieved from Penerapan E-government di Korea dan Indonesia: https://www.researchgate.net/profile/Eko_Purnomo4/publication/342519033_Studi_Komparasi_Penerapan_E-Government_di_Korea_Selatan_dan_Indonesia/links/5fcdf5f3299bf188d4fd8b3b/Studi-Komparasi-Penerapan-E-Government-di-Korea-Selatan-dan-Indonesia.pdf
- Iwan Henri Kusnadi, Muhammad Rifqi Baihaqi. (2020, Desember 2). Retrieved from Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Subang: <https://ejournal.unsub.ac.id/index.php/publik/article/view/926/788>
- Purwani, F. (2015, Juli 15). Retrieved from Tahapan Pengembangan E-government Dalam Pendidikan: <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/warda/article/view/205>
- Tewennews*. (2019, Januari 1). Retrieved from <https://tewenews.com/diskominfo-barito-timur-kembangkan-aplikasi-mantra/>